

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis maupun organisasi banyak sekali mengalami perubahan baik dari ilmu pengetahuan maupun teknologi khususnya dibidang komunikasi dan informasi. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa perkembangan ini dapat menimbulkan tantangan besar bagi sebuah perusahaan maupun instansi pemerintah dalam memasuki dunia global. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan maupun instansi pemerintah diminta untuk bisa bertahan dengan menyiapkan sebuah strategi atau pengukuran kinerja yang baik agar tujuan atau visi dan misi sebuah perusahaan atau organisasi dapat tercapai.

Menurut Suta dan Dwiastuti (2016) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Pengukuran sukses maupun tidaknya suatu instansi dapat dikatakan sukses apabila instansi tersebut telah menjalankan misi organisasi serta memberikan pelayanan publik dengan baik (Wahid, 2022).

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yaitu di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah memiliki tugas yaitu menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan

koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman mempunyai peran penting terhadap pelaku industri baik makro maupun mikro. Berikut data pertumbuhan Koperasi dan UMKM yang telah masuk dalam data Dinas Koperasi UKM Sleman dari tahun 2019 sampai dengan 2022:

Tabel 1. 1
Jumlah Koperasi, Anggota, Manajer, Modal Sendiri, dan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Sleman

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Jumlah Manajer Koperasi	Jumlah Modal Sendiri	Jumlah Volume Usaha
2019	410	229.913	92	366.798.060.571	1.728.235.774.671
2020	407	226.850	91	509.274.332.568	1.322.874.556.850
2021	420	229.831	85	423.102.539.285	1.523.261.415.085
2022	419	183.883	81	373.023.254.086	1.194.060.415.822

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Sleman (2023)

Berlandaskan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat pertumbuhan koperasi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Menurut R Haris Martapa selaku Kepala Dinas KUKM Sleman, hal ini dikarenakan banyak koperasi yang tidak aktif lantaran disebabkan oleh sejumlah faktor. Antara lain operasional yang terganggu selama pandemi Covid-19, tidak adanya regenerasi di organisasi koperasi, serta tidak mengadakan agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) hingga tiga kali berturut-turut. Dengan demikian Dinas KUKM Sleman berusaha melakukan berbagai upaya agar koperasi di Sleman semakin baik lagi, sehingga dapat kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

data koperasi sudah mengalami kenaikan. Selanjutnya ada pemaparan data pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sleman:

Tabel 1. 2
Jumlah UMKM, Total Aset dan Omset UMKM di Kabupaten Sleman

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Total Aset	Jumlah Total Omset
2019	41.852	1.076.106.440.627	6.097.463.397.249
2020	68.382	726.100.764.097	4.274.801.639.970
2021	90.170	695.178.196.626	3.273.952.054.384
2022	90.557	698.640.756.646	3.289.186.891.050

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Sleman (2023)

Berlandaskan tabel diatas dapat diketahui bahwa usaha kecil menengah mengalami kenaikan data setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi UKM memberikan pelayanan berupa Program BPUM dan Dana Hibah kepada para UMKM, sehingga banyak UMKM yang berbondong bondong untuk dimintai datanya. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu instansi pemerintah atau organisasi sektor publik bisa berjalan dengan baik apabila ilmu pengetahuan dan teknologinya didukung dengan sistem pengendalian manajemen yang baik (Cholifah, 2017).

Pada instansi pemerintah, *balanced scorecard* dapat digunakan untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja instansi dengan menggunakan keempat perspektif dari *balanced scorecard*. Secara umum tujuan umum perusahaan dan instansi pemerintah sangat berbeda, pada perusahaan atau sektor swasta tujuan utamanya berorientasi terhadap laba, sedangkan pada instansi pemerintah atau sektor publik tujuan utamanya berorientasi pada layanan publik (Setiawan dan AvriLivanni, 2020). Meskipun instansi pemerintah tidak bertujuan untuk mencari

laba, perusahaan maupun instansi sama-sama memiliki misi yang sama, yaitu melayani masyarakat. Dengan demikian suatu instansi pemerintah harus menuangkan visinya ke dalam strategi, tujuan atau target yang ingin dicapai, agar pencapaian misi instansi dapat terpenuhi (Rhuminda, 2017).

Pada dasarnya *balanced scorecard* terdiri atas dua kata, yaitu *balanced* (berimbang) dan *scorecard* (kartu skor). Kata *balanced* (berimbang) bisa diartikan sebagai kinerja yang dapat diukur melalui dua sisi, yaitu dari sisi keuangan dan non keuangan, serta jangka waktu pengukuran kinerja dapat diukur dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan kata *scorecard* (kartu skor) merupakan kartu yang dapat digunakan untuk mencatat atau menilai skor hasil kinerja, baik yang terjadi sekarang, maupun untuk perencanaan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan perusahaan ataupun instansi (Nafisah, 2022). Menurut Limbu dan Sisdyani (2016) mengemukakan bahwa ada empat perspektif yang dapat diukur dalam *balanced scorecard*, yaitu perspektif keuangan (*financial perspective*), perspektif pelanggan (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business perspective*), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Berdasarkan penelitian (Cholifah, 2017), hasil analisis penerapan *balance scorecard* sebagai alat ukur dalam penilaian kinerja menghasilkan penilaian yang sangat baik, dalam hal ini organisasi seharusnya mengetahui bahwa *balance scorecard* dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan, sehingga pengukuran kinerjanya menjadi lebih baik. Selain penelitian tersebut, ada beberapa hasil penelitian yang terkait dengan perspektif *balance scorecard* diantaranya,

penelitian Suta dan Dwiastuti (2016), menunjukkan bahwa penilaian kinerja perusahaan melalui perspektif keuangan menghasilkan nilai sangat baik. Hal ini dikarenakan hasil yang diperoleh melalui rasio permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas dan profitabilitas adalah memuaskan, sehingga perusahaan mampu menjalankan usahanya jika dilihat dari sisi keuangannya.

Berdasarkan penelitian lain oleh Adhan dan Ernita (2019) melalui perspektif pelanggan menunjukkan bahwa pengukuran kinerja perspektif pelanggan berada dalam kategori memuaskan, hal ini dikarenakan fokus dari tujuan organisasi atau instansi pemerintah adalah kepuasan masyarakat. Hasil penelitian Wahid (2022) dalam perspektif proses bisnis internal menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan sudah berada dalam kategori baik, hal ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para pegawai mengenai dimensi fasilitas, sumber daya manusia dan proses. Selanjutnya, hasil penelitian Nafisah (2022) dalam mengukur perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan hasil yang baik, hal ini dikarenakan pegawai memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi perusahaan, selain itu organisasi juga memberikan motivasi serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawainya. Dari beberapa hasil penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *balanced scorecard* pada instansi pemerintah, karena konsep pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *balance scorecard* terlihat sangat baik dan dapat diaplikasikan kedalam organisasi swasta maupun organisasi publik.

Kebaharuan dalam penelitian ini menggunakan empat perspektif dari pendekatan *balanced scorecard*, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan objek penelitian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman, sehingga hal tersebut menjadi kebaharuan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul "**Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pendekatan *Balance Scorecard*" (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman diukur menggunakan pendekatan *balanced scorecard*?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang dikemukakan diatas yaitu untuk menganalisis kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman yang diukur menggunakan pendekatan *balanced scorecard*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi, yaitu berkaitan dengan pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard*.
- b) Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan *balanced scorecard* sebagai suatu pengukuran kinerja pada perusahaan atau instansi pemerintah.

b) Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi di masa yang akan datang pada kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat memperkuat asumsi dalam pengambilan keputusan.

c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi maupun tambahan informasi khususnya dalam ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja instansi pemerintah menggunakan pendekatan *balanced scorecard*.

